



Department of Digital Business

**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 12397-12405

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

---

## Transformasi Hubungan Diplomatik Teheran–Washington Pascarevolusi Islam Iran 1979

Ananda Armando Chandra Putra, Aldi Septian Putra, Dheny Wiratmoko

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta

[anandaarmando.2025@student.uny.ac.id](mailto:anandaarmando.2025@student.uny.ac.id), [aldiseptian.2025@student.uny.ac.id](mailto:aldiseptian.2025@student.uny.ac.id), [dhenywiratmoko@uny.ac.id](mailto:dhenywiratmoko@uny.ac.id)\*

### Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi hubungan diplomatik antara Iran dan Amerika Serikat pasca terjadinya Revolusi Islam Iran tahun 1979. Sebelum revolusi, kedua negara menjalin hubungan yang erat dan strategis, terutama pada masa pemerintahan Mohammad Reza Pahlavi yang pro-Barat. Iran pada periode tersebut berperan sebagai sekutu utama Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah, khususnya dalam bidang keamanan dan geopolitik. Namun, perubahan sistem politik Iran menjadi Republik Islam di bawah kepemimpinan Ayatollah Ruhollah Khomeini membawa pergeseran signifikan dalam orientasi kebijakan luar negeri Iran yang cenderung anti-Barat. Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan pendekatan kualitatif melalui studi literatur, yang meliputi tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Revolusi Islam 1979 serta krisis penyanderaan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Teheran menjadi titik awal memburuknya hubungan diplomatik kedua negara. Ketegangan tersebut berlanjut dalam berbagai isu strategis, seperti program nuklir Iran, pemberlakuan sanksi ekonomi oleh Amerika Serikat, serta dinamika negosiasi internasional yang menghasilkan kesepakatan Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). Meskipun terdapat upaya normalisasi hubungan melalui perundingan internasional, hubungan Iran dan Amerika Serikat tetap berada dalam kondisi fluktuatif dan dipengaruhi oleh dinamika politik domestik maupun global. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa perubahan sistem politik domestik memiliki dampak yang signifikan terhadap arah hubungan internasional suatu negara.*

*Kata kunci: Revolusi Iran 1979, Hubungan Diplomatik, Iran, Amerika Serikat, JCPOA*

### 1. Latar Belakang

Revolusi Islam Iran merupakan salah satu peristiwa revolusioner yang memiliki dampak besar di kawasan Timur Tengah. Peristiwa ini tidak hanya menandai runtuhnya rezim lama, tetapi juga melahirkan Republik Islam Iran sebagai sebuah negara yang secara unik mengintegrasikan nilai-nilai agama dan politik ke dalam sistem konstitusinya. Fenomena ini menunjukkan bahwa kebangkitan agama dapat menjadi kekuatan sosial dan politik yang mampu mengguncang tatanan lama sekaligus membentuk struktur kenegaraan yang baru (Fauziah et al., 2026). Dalam konteks tersebut, Revolusi Islam Iran menjadi contoh nyata bagaimana ideologi keagamaan dapat memainkan peran sentral dalam proses transformasi politik suatu negara.

Lebih lanjut, perubahan yang terjadi pasca revolusi tidak hanya berdampak pada aspek domestik, tetapi juga membawa implikasi signifikan terhadap posisi Iran dalam hubungan internasional. Iran kemudian berkembang menjadi aktor penting dalam dinamika politik global, khususnya di kawasan Timur Tengah. Keberadaannya semakin diperhitungkan oleh negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Inggris, baik dalam konteks geopolitik maupun keamanan internasional (Fachrudin Sumarmo, 2020). Oleh karena itu, Revolusi Islam Iran tidak hanya dapat dipahami sebagai perubahan internal, tetapi juga sebagai peristiwa yang memengaruhi keseimbangan kekuatan dalam percaturan politik dunia. Hubungan diplomatik antara Iran dan Amerika Serikat dalam perkembangannya mengalami proses yang dinamis. Ditinjau melalui rekam jejak kedua negara, hubungan dan kerjasama yang dibangun tergolong progresif, terutama di masa kepemimpinan Mohammad Reza Pahlavi. Pada saat itu, Iran menjadi mitra terpenting AS di kawasan Teluk Persia (Maulida Alkholid & Taufiq, 2021). Untuk menjaga stabilitas kepemimpinannya, pemerintah membentuk badan intelijen dan kepolisian rahasia yang dikenal dengan nama SAVAK pada tahun 1957. Lembaga ini dibentuk dan dilatih dengan bantuan CIA (Amerika Serikat), MI6 (Inggris), serta Mossad (Israel) (Teague, 2024).

Revolusi Islam Iran merupakan salah satu peristiwa revolusioner paling berpengaruh di kawasan Timur Tengah yang tidak hanya mengubah tatanan politik domestik, tetapi juga memberikan dampak signifikan terhadap dinamika geopolitik global. Peristiwa ini tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang berkembang di Iran pada masa pemerintahan Mohammad Reza Pahlavi. Di dalam negeri, Reza Pahlavi menggelorakan gerakan westernisasi sebagai bagian dari proyek modernisasi negara yang berorientasi pada nilai-nilai Barat. Orientasi pro-Barat tersebut telah tampak sejak awal pemerintahannya, termasuk dalam proses penobatannya yang menyerupai tradisi monarki di Britania Raya dan Belanda. Ia bahkan menegaskan bahwa Dinasti Pahlavi merupakan bagian integral dari institusi monarki global (Steele, 2021).

Upaya modernisasi tersebut mencapai puncaknya ketika pada tahun 1963 Reza Pahlavi meluncurkan program Revolusi Putih. Program ini mencakup berbagai kebijakan strategis seperti nasionalisasi kepemilikan tanah, penerapan program wajib pendidikan bergaya Barat bagi masyarakat desa, pengurangan otonomi kelompok suku, serta reformasi dalam tatanan sosial dan hukum. Meskipun secara konseptual program ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan dan modernisasi Iran, implementasinya tidak didukung oleh infrastruktur vital yang memadai. Akibatnya, kebijakan tersebut justru memicu terjadinya ketimpangan pembangunan antarwilayah (Pradani et al., 2026).

Memasuki dekade 1970-an, kesenjangan sosial-ekonomi di Iran semakin terlihat jelas dan meluas. Kelompok masyarakat dengan stratifikasi kelas atas memperoleh manfaat signifikan dari kebijakan modernisasi, sementara kelompok sosial tradisional justru mengalami kerugian bahkan marginalisasi. Kelompok ini, yang terdiri dari para pedagang, masyarakat urban menengah, hingga kalangan ulama, menilai bahwa kebijakan pemerintah telah merusak kepentingan ekonomi serta menurunkan status sosial mereka. Kondisi tersebut kemudian memicu ketidakpuasan yang meluas dan menjadi salah satu faktor utama yang melatarbelakangi munculnya gerakan revolusioner di Iran (Fachrudin Sumarmo, 2020).

Kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang tidak stabil pada masa pemerintahan Reza Pahlavi memicu meningkatnya ketidakpuasan di kalangan masyarakat Iran. Ketimpangan sosial, otoritarianisme, serta ketergantungan terhadap kekuatan Barat, khususnya Amerika Serikat, menjadi faktor utama yang memperkuat resistensi publik. Situasi tersebut kemudian berkembang menjadi gelombang protes besar yang berujung pada terjadinya Revolusi Islam Iran pada tahun 1979. Dalam peristiwa ini, rakyat sipil secara masif turun ke jalan untuk menyuarakan tuntutan perubahan sistem pemerintahan. Tidak hanya itu, aksi simbolik seperti pembakaran foto Reza Pahlavi juga mencerminkan puncak kemarahan dan penolakan terhadap rezim yang berkuasa. Krisis multidimensional yang melanda Iran akhirnya memaksa Reza Pahlavi beserta keluarganya meninggalkan negara tersebut pada 16 Januari 1979 (Pradani et al., 2026).

Revolusi Islam Iran tidak dapat dilepaskan dari peran sentral Ayatollah Khomeini sebagai tokoh utama yang menggerakkan massa dan membangun ideologi revolusi. Keberhasilannya dalam menggulingkan rezim monarki telah mengubah tatanan politik Iran secara fundamental setelah puluhan tahun berada di bawah kekuasaan kerajaan. Di bawah kepemimpinan Khomeini, Iran kemudian mengadopsi sistem pemerintahan berbasis Islam serta mengubah arah kebijakan luar negerinya secara drastis, termasuk dengan memutus hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat (Maulida Alkholid & Taufiq, 2021). Perubahan ini menandai babak baru dalam dinamika politik domestik dan internasional Iran.

Pada tahun 1980, terjadi penyanderaan terhadap warga negara Amerika Serikat di Teheran yang menjadi titik awal memburuknya hubungan diplomatik antara kedua negara. Peristiwa ini mendorong pemerintah Amerika Serikat untuk mengambil langkah tegas melalui penerbitan perintah eksekutif yang membekukan seluruh hak properti Pemerintah Iran, termasuk aset lembaga-lembaga negara serta Bank Sentral Iran yang berada dalam yurisdiksi Amerika Serikat. Tidak hanya itu, Amerika Serikat juga memberlakukan embargo terhadap impor minyak dari Iran sebagai bentuk tekanan ekonomi. Kebijakan tersebut menimbulkan dampak yang sangat signifikan bagi perekonomian Iran, dengan kerugian yang mencapai hingga 10× lipat. Di sisi lain, kondisi ini juga mendorong Amerika Serikat untuk mengurangi ketergantungan terhadap minyak Iran dengan mengembangkan dan memberdayakan sumber energi alternatif (Meiza Zein et al., 2024).

Ketegangan antara kedua negara semakin meningkat setelah terjadinya Revolusi Islam Iran pada tahun 1979, yang mengubah sistem pemerintahan Iran secara fundamental. Krisis penyanderaan di Kedutaan Besar Amerika Serikat menjadi simbol konflik ideologis dan politik yang berkepanjangan. Sejak pertengahan 1990-an, situasi semakin kompleks dengan adanya program pengembangan nuklir Iran yang memicu kekhawatiran global.

Amerika Serikat kemudian memimpin tekanan internasional terhadap Iran dengan memanfaatkan narasi demokratisasi serta isu proliferasi senjata nuklir.

Dalam konteks tersebut, Amerika Serikat secara konsisten melabeli Iran sebagai negara yang tidak demokratis dan berpotensi mengancam stabilitas keamanan kawasan, khususnya di Timur Tengah. Labelisasi ini tidak hanya memperkuat legitimasi kebijakan luar negeri Amerika Serikat, tetapi juga menjadi dasar bagi penerapan berbagai bentuk sanksi internasional terhadap Iran. Dengan demikian, dinamika hubungan antara Iran dan Amerika Serikat tidak hanya dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi, tetapi juga oleh faktor ideologi, keamanan, dan politik global yang saling berkaitan (Irawan, 2021).

Meskipun sejumlah penelitian telah membahas mengenai pasang surut hubungan Amerika Serikat dan Iran, kajian-kajian tersebut umumnya masih bersifat parsial. Sebagian besar penelitian cenderung hanya menyoroti periode tertentu, seperti konflik terkait isu nuklir atau dinamika kebijakan luar negeri pasca-revolusi Iran, tanpa mengaitkannya dalam satu kerangka analisis yang komprehensif. Akibatnya, pemahaman mengenai hubungan diplomatik kedua negara sering kali terfragmentasi dan belum mampu menggambarkan perubahan secara utuh dari waktu ke waktu. Padahal, hubungan antara Amerika Serikat dan Iran memiliki dinamika yang kompleks, melibatkan berbagai faktor politik, ideologi, ekonomi, serta kepentingan strategis yang saling berinteraksi.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengisi celah tersebut dengan menghadirkan analisis yang lebih menyeluruh terhadap pola transformasi hubungan diplomatik kedua negara. Dengan mengkaji perkembangan hubungan tersebut secara historis dan berkesinambungan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai dinamika yang terjadi. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan kajian dalam ilmu sejarah dan ilmu hubungan internasional, khususnya dalam memahami hubungan bilateral yang bersifat kompleks dan dinamis.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah dengan pendekatan kualitatif untuk memahami dinamika hubungan antara Amerika Serikat dan Iran secara mendalam dan komprehensif. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan memanfaatkan berbagai sumber data berupa jurnal ilmiah yang relevan dengan dinamika hubungan Amerika Serikat dan Iran, baik sebelum maupun pasca Revolusi Islam 1979. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran yang luas serta analisis yang mendalam terhadap fenomena yang dikaji berdasarkan data sekunder yang kredibel dan teruji.

Menurut Kuntowijoyo, metode penelitian sejarah terdiri atas beberapa tahapan yang dilakukan secara sistematis dan berurutan. Tahap awal adalah heuristik, yaitu proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang relevan dengan topik yang diteliti. Sumber tersebut dapat berupa dokumen tertulis, artefak (benda), sumber lisan, maupun data kuantitatif yang memiliki keterkaitan dengan penelitian. Dalam konteks penelitian ini, peneliti lebih menitikberatkan pada penggunaan sumber tertulis berupa jurnal ilmiah dan literatur akademik lainnya yang relevan.

Setelah sumber terkumpul, tahap selanjutnya adalah kritik sumber, yaitu proses verifikasi atau pengujian terhadap keabsahan data sejarah, baik sumber primer maupun sekunder. Tahap ini bertujuan untuk memastikan otentisitas atau keaslian fisik sumber melalui kritik eksternal serta menilai kredibilitas atau tingkat kepercayaan isi sumber melalui kritik internal. Dengan demikian, fakta sejarah yang dihasilkan dapat bersifat objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Tahap berikutnya adalah interpretasi data, yaitu proses penafsiran, pemaknaan, serta perangkaian fakta-fakta sejarah yang telah diverifikasi menjadi satu kesatuan yang kronologis dan logis. Proses ini dilakukan melalui dua cara, yaitu analisis (menguraikan fakta) dan sintesis (menyatukan fakta), dengan tujuan merekonstruksi peristiwa masa lampau secara objektif meskipun tetap melibatkan subjektivitas yang bersifat rasional.

Tahap terakhir adalah historiografi, yaitu proses penulisan kembali peristiwa masa lalu berdasarkan fakta-fakta yang telah diverifikasi dan diinterpretasikan secara sistematis. Melalui tahap ini, peneliti menyusun hasil

penelitian dalam bentuk narasi ilmiah yang runtut dan mudah dipahami, sehingga menghasilkan rekonstruksi sejarah yang menekankan pada fakta empiris serta dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masa kini maupun masa depan.

### 3. Hasil dan Diskusi

#### a. Kemitraan Strategis Iran–Amerika Serikat pada Era Mohammad Reza Pahlavi

Hubungan antara Iran dan Amerika Serikat telah mengalami proses dinamika yang cukup kompleks dalam sejarah modern. Relasi kedua negara tidak hanya dipengaruhi oleh kepentingan politik jangka pendek, tetapi juga oleh faktor ideologi, keamanan, serta kepentingan geopolitik yang berkembang dari waktu ke waktu. Pada masa pemerintahan Mohammad Reza Pahlavi, Iran dan Amerika Serikat menjalin hubungan dekat yang dapat dikategorikan sebagai kemitraan strategis (Maulida Alkholid & Taufiq, 2021). Kedekatan ini terbentuk karena adanya kesamaan kepentingan, khususnya dalam menghadapi pengaruh Uni Soviet pada masa Perang Dingin. Iran diposisikan sebagai salah satu sekutu utama Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah yang memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas regional.

Selama masa kepemimpinannya, Mohammad Reza Pahlavi menerapkan kebijakan ganda yang bertujuan untuk memperkuat konsolidasi kekuasaan di dalam negeri sekaligus mempertahankan keselarasan dengan kepentingan strategis Amerika Serikat. Dalam praktiknya, kebijakan ini diwujudkan melalui penguatan institusi negara serta peningkatan kerja sama militer dan ekonomi dengan Amerika Serikat. Dalam berbagai isu internasional, kebijakan Amerika Serikat dan Iran dinilai berjalan sejajar sehingga memperkuat posisi masing-masing. Mohammad Reza Pahlavi bahkan dipandang sebagai sekutu tanpa syarat yang memiliki pemahaman mendalam terhadap dinamika politik global (Partowazar, 2016). Hal ini menjadikan Iran sebagai mitra yang sangat dapat diandalkan oleh Amerika Serikat dalam menjalankan berbagai agenda strategisnya di kawasan.

Dalam bidang pertahanan dan keamanan luar negeri, Amerika Serikat memberikan konsesi terhadap isu hak asasi manusia dan mengizinkan Iran membeli hampir seluruh sistem persenjataan Amerika, kecuali teknologi militer yang paling mutakhir. Kebijakan tersebut mencerminkan tradisi panjang dukungan Amerika Serikat terhadap Mohammad Reza Pahlavi. Dukungan ini tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga diwujudkan dalam bentuk bantuan militer dan pelatihan bagi angkatan bersenjata Iran. Pada periode tersebut, setiap presiden Amerika menerima Shah di Gedung Putih dan memperkuat hubungan bilateral melalui dukungan politik maupun militer (Teague, 2024). Hubungan yang erat ini menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi antara kedua negara dalam menjaga kepentingan bersama.

Selain itu, Iran memberikan sejumlah keuntungan geopolitik bagi Amerika Serikat. Letak geografis Iran yang berbatasan langsung dengan Uni Soviet memungkinkan dilakukannya operasi intelijen strategis, sekaligus menyediakan koridor udara yang relatif aman antara Eropa dan Asia Tenggara (Baslamisli, 2026). Posisi ini menjadikan Iran sebagai aset strategis yang sangat penting dalam peta politik global pada masa itu. Dengan memanfaatkan wilayah Iran, Amerika Serikat dapat memperluas jangkauan pengaruhnya serta meningkatkan efektivitas operasi intelijen di kawasan yang sensitif.

Untuk menjaga stabilitas pemerintahan dalam negeri, Mohammad Reza Pahlavi yang didukung oleh AS menerapkan kontrol politik yang ketat. Kebijakan ini dilakukan untuk mengantisipasi berbagai bentuk oposisi yang berpotensi mengganggu kekuasaan rezim. Pada tahun 1957, dibentuklah polisi rahasia Iran yang dikenal sebagai SAVAK dengan bantuan Central Intelligence Agency (CIA), MI6, dan Mossad. Lembaga ini berfungsi sebagai instrumen utama keamanan rezim, beroperasi di dalam maupun di luar negeri untuk menjaga kepentingan pemerintah. SAVAK memiliki kewenangan luas untuk menangkap dan menahan individu yang dianggap mengancam stabilitas negara, termasuk kalangan mahasiswa dan akademisi yang dicurigai sebagai oposisi (Teague, 2024). Keberadaan SAVAK menjadi simbol kuat dari kontrol negara terhadap masyarakat.

Tujuan awal SAVAK adalah melemahkan dan mengendalikan partai oposisi terkuat Shah, yaitu Partai Tudeh. Hal ini dilakukan melalui operasi intelijen dan kampanye infiltrasi media secara sistematis. SAVAK menyebarkan berbagai informasi dan rumor yang mendiskreditkan Partai Tudeh, termasuk tuduhan bahwa partai tersebut berada di balik kudeta Mohammad Mosaddegh. Strategi ini berhasil memengaruhi persepsi publik terhadap Partai Tudeh sekaligus memperkuat legitimasi politik (McGhee, 2023). Dengan demikian, stabilitas politik dalam negeri dapat dipertahankan, meskipun dilakukan melalui pendekatan yang represif.

Pada tahun 1963, Mohammad Reza Pahlavi meluncurkan program reformasi yang dikenal sebagai Revolusi Putih dalam rangka mengkonsolidasikan kembali kekuatan politiknya yang sempat melemah pada masa pemerintahan Mohammad Mosaddegh. Program ini menjadi salah satu tonggak penting dalam upaya modernisasi Iran. Mohammad Reza Pahlavi mengklaim bahwa Revolusi Putih merupakan upaya modernisasi dan westernisasi Iran. Selain itu, program tersebut juga bertujuan untuk mengurangi pengaruh kuat para tuan tanah di Iran serta membangun basis dukungan politik baru dari kalangan petani dan kelas pekerja (Mikail, 2019). Dengan demikian, reformasi ini tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi politik yang kuat.

Program Revolusi Putih mencakup berbagai kebijakan, antara lain nasionalisasi kepemilikan tanah, penerapan pendidikan bergaya Barat, perluasan layanan kesehatan bagi masyarakat pedesaan, pengurangan otonomi kelompok suku, serta pemberian hak politik yang lebih besar kepada kaum perempuan. Kebijakan-kebijakan ini dirancang untuk mendorong transformasi sosial yang lebih progresif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Namun, pelaksanaan program ini tidak sepenuhnya didukung oleh fasilitas dan infrastruktur yang memadai sehingga menimbulkan ketimpangan pembangunan antara wilayah pedesaan dan perkotaan. Ketimpangan ini pada akhirnya memunculkan berbagai permasalahan sosial yang cukup signifikan.

Di sisi lain, kebijakan pendidikan sekuler yang diperkenalkan pemerintah serta keterlibatan perempuan dalam ranah politik memicu penolakan dari sebagian kalangan ulama. Penolakan ini menunjukkan adanya benturan antara nilai-nilai tradisional dengan modernisasi yang diusung oleh pemerintah. Kebijakan tersebut dianggap mengurangi peran ulama dalam sistem pendidikan dan dipandang bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan yang berlandaskan tradisi Islam Syiah (Pradani et al., 2026). Kondisi ini memperlihatkan bahwa modernisasi yang dilakukan tidak sepenuhnya diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dengan demikian, dinamika hubungan antara Iran dan Amerika Serikat pada masa pemerintahan Mohammad Reza Pahlavi tidak dapat dilepaskan dari konteks domestik maupun internasional yang saling berkaitan. Kedekatan kedua negara memberikan keuntungan strategis bagi masing-masing pihak, tetapi juga menimbulkan konsekuensi politik dan sosial di dalam negeri Iran. Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Mohammad Reza Pahlavi, baik dalam bidang politik, keamanan, maupun sosial, mencerminkan upaya untuk mempertahankan kekuasaan sekaligus menyesuaikan diri dengan tuntutan global. Namun, di balik itu semua, muncul berbagai tantangan yang pada akhirnya menjadi bagian penting dalam dinamika sejarah hubungan Iran dan Amerika Serikat.

## **b. Revolusi Islam Iran 1979 dan Awal Keretakan Hubungan Iran–Amerika Serikat**

Latar belakang terjadinya Revolusi Iran tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik, sosial, dan ekonomi yang berkembang sejak pertengahan abad ke-20. Pada masa tersebut, Iran berada di bawah pemerintahan Shah Mohammad Reza Pahlavi yang dikenal sebagai rezim otoriter dengan dukungan kuat dari negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat. Dukungan ini tidak hanya bersifat politik, tetapi juga mencakup bantuan militer dan ekonomi yang bertujuan memperkuat posisi Iran sebagai sekutu strategis di kawasan Timur Tengah. Dalam mempertahankan kekuasaannya, Shah juga mengandalkan aparat keamanan seperti SAVAK yang memiliki peran besar dalam menekan oposisi melalui pengawasan ketat, penangkapan, hingga tindakan represif terhadap pihak-pihak yang dianggap mengancam stabilitas rezim.

Dalam upaya mendorong kemajuan negara, Shah Mohammad Reza Pahlavi meluncurkan program Revolusi Putih sejak awal 1960-an. Program ini bertujuan untuk mempercepat modernisasi di berbagai sektor, termasuk pertanian, pendidikan, dan industrialisasi. Kebijakan tersebut mencerminkan orientasi westernisasi yang kuat, dengan mengadopsi nilai-nilai dan sistem dari Barat. Meskipun secara ekonomi program ini membawa sejumlah kemajuan, dampak sosial yang ditimbulkan justru memunculkan berbagai permasalahan baru. Kesenjangan sosial semakin melebar antara kelompok elit yang diuntungkan oleh pembangunan dan masyarakat kelas bawah yang tidak merasakan manfaat secara signifikan. Selain itu, kelompok tradisional, termasuk ulama dan masyarakat pedesaan, mengalami marginalisasi akibat perubahan struktur sosial yang cepat. Peran agama dalam kehidupan publik pun semakin terpinggirkan, sehingga menimbulkan ketegangan antara pemerintah dan kelompok religius. Akumulasi ketidakpuasan inilah yang menjadi salah satu faktor utama munculnya Revolusi Islam 1979 (Fauziah et al., 2026).

Di samping dinamika domestik tersebut, hubungan Iran dengan Amerika Serikat juga mengalami perubahan sejak awal dekade 1970-an. Pada periode ini, Mohammad Reza Pahlavi mulai menunjukkan sikap yang lebih mandiri dalam kebijakan luar negeri. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya kekuatan ekonomi Iran sebagai salah satu produsen minyak utama dunia, terutama setelah kenaikan harga minyak oleh OPEC. Kondisi tersebut memberikan kepercayaan diri bagi Iran untuk memainkan peran yang lebih besar di tingkat internasional. Dalam beberapa situasi, kebijakan luar negeri Iran bahkan dipandang tidak sepenuhnya sejalan dengan kepentingan Amerika Serikat, sehingga memunculkan ketegangan tersendiri dalam hubungan bilateral kedua negara. Selain itu, faktor regional juga turut memengaruhi dinamika tersebut, terutama rivalitas historis dan kultural antara Iran dan negara-negara Arab di kawasan Timur Tengah yang semakin memperumit kondisi geopolitik (Baslamisli, 2026).

Pergolakan masyarakat Iran dalam menentang kekuasaan Shah mencapai titik awal yang signifikan pada 9 Januari 1978 di Kota Qom. Demonstrasi yang terjadi pada saat itu dipicu oleh pernyataan Menteri Penerangan Iran, Darius Hamayan, yang dianggap menghina Ayatollah Khomeini. Khomeini merupakan tokoh ulama yang sangat dihormati oleh masyarakat Iran, meskipun saat itu ia berada dalam pengasingan selama 14 tahun. Peristiwa ini menjadi pemicu bangkitnya gelombang protes yang lebih luas, karena nama Khomeini kembali menjadi simbol perlawanan terhadap rezim Pahlavi (Meiza Zein et al., 2024). Demonstrasi yang awalnya bersifat lokal kemudian berkembang menjadi gerakan nasional yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat, termasuk mahasiswa, ulama, dan kelompok pekerja.

Situasi semakin memanas pada 19 Agustus 1978 ketika terjadi tragedi kebakaran di Bioskop Cinema Rex di Abadan. Kebakaran yang terjadi saat pemutaran film tersebut menewaskan sekitar 400 orang dan melukai lebih dari 200 orang lainnya. Peristiwa ini menjadi salah satu tragedi paling mematikan dalam sejarah modern Iran dan memicu kemarahan publik yang sangat besar. Sebagian besar masyarakat Iran menuduh rezim Pahlavi berada di balik insiden tersebut, meskipun kebenarannya masih menjadi perdebatan. Tuduhan ini semakin memperburuk citra pemerintah di mata rakyat dan memperkuat sentimen anti-rezim yang telah berkembang sebelumnya (Pradani et al., 2026).

Perlawanan terhadap kekuasaan Shah Mohammad Reza Pahlavi pun semakin meluas dan intensif. Demonstrasi besar terjadi di berbagai kota, termasuk di Tabriz, yang menjadi salah satu pusat perlawanan penting. Aksi protes berlangsung secara terus-menerus dan melibatkan jutaan warga Iran yang turun ke jalan untuk menyuarakan tuntutan mereka. Mereka tidak hanya menuntut reformasi politik, tetapi juga mendesak pengunduran diri Perdana Menteri Shahpur Bakhtiar serta meminta agar Ayatollah Khomeini segera kembali ke Iran untuk memimpin perubahan. Tekanan yang semakin besar dari rakyat membuat situasi politik menjadi tidak terkendali. Pada akhirnya, kondisi tersebut memaksa Mohammad Reza Pahlavi meninggalkan Iran pada Januari 1979. Kepergian Shah disambut dengan perayaan besar oleh masyarakat dan menjadi penanda runtuhnya kekuasaan monarki Pahlavi di Iran (Kurzman, 2003).

Revolusi Iran kemudian membawa perubahan besar dalam sistem pemerintahan negara tersebut. Iran yang sebelumnya berbentuk monarki berubah menjadi Republik Islam di bawah kepemimpinan Ayatollah Agung Ruhollah Khomeini sebagai pemimpin revolusi. Transformasi ini tidak hanya berdampak pada struktur politik domestik, tetapi juga memengaruhi hubungan luar negeri Iran, khususnya dengan Amerika Serikat. Ketegangan antara kedua negara meningkat secara signifikan, terutama setelah terjadinya peristiwa penyanderaan di Kedutaan Besar Amerika Serikat di Teheran pada 4 November 1979.

Peristiwa tersebut bermula ketika sekelompok mahasiswa pendukung Ayatollah Khomeini menyerbu kompleks kedutaan dengan menerobos pagar dan memasuki gedung. Sebelum para demonstran berhasil masuk, pihak kedutaan sempat menerima instruksi darurat untuk menghancurkan dokumen-dokumen rahasia dengan cara membakarnya. Namun, upaya tersebut tidak sepenuhnya berhasil karena adanya kerusakan pada alat pembakar. Setelah menguasai gedung, para demonstran menawan 66 orang yang sebagian besar merupakan diplomat dan pegawai kedutaan. Para penyandera kemudian menyatakan bahwa para tahanan hanya akan dibebaskan apabila Mohammad Reza Pahlavi dikembalikan ke Iran untuk diadili (Adela, 2017).

Sebagai respons terhadap krisis tersebut, Presiden James Earl Carter Jr. berupaya melakukan pembebasan sandera melalui operasi militer. Namun, upaya ini mengalami kegagalan meskipun telah dilakukan beberapa kali percobaan. Kegagalan tersebut semakin memperburuk hubungan antara Amerika Serikat dan Iran serta menimbulkan tekanan politik domestik bagi pemerintah Amerika Serikat. Krisis penyanderaan ini berlangsung

selama lebih dari satu tahun dan menjadi salah satu konflik diplomatik paling signifikan dalam sejarah hubungan kedua negara.

Para sandera akhirnya dibebaskan pada 20 Januari 1981 setelah tercapainya kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran. Pembebasan tersebut terjadi tepat sehari sebelum pelantikan Ronald Reagan sebagai Presiden Amerika Serikat, yang menandai berakhirnya krisis panjang tersebut. Sementara itu, sejak tahun 1979, kasus penyanderaan ini telah dibawa ke Mahkamah Internasional oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pemerintah Iran dituduh melanggar prinsip-prinsip hukum internasional serta beberapa perjanjian internasional, termasuk Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik dan Konsuler (Bommerla et al., 2024). Peristiwa ini semakin mempertegas perubahan drastis dalam hubungan Iran dan Amerika Serikat pasca Revolusi Islam 1979.

### **c. Dinamika Hubungan Diplomatik Iran–Amerika Serikat Pascarevolusi: Isu Nuklir, Sanksi, dan JCPOA**

Iran sebenarnya memiliki kapasitas teknis untuk menghasilkan hulu ledak nuklir. Kapasitas tersebut dibingkai melalui program Atoms For Peace. Program tersebut telah dikembangkan sejak masa pra-Revolusi Islam, ketika Mohammad Reza Pahlavi menjalin kerja sama dengan Amerika Serikat dalam bidang pengembangan energi nuklir (Mikail & Fathoni, 2019). Program Atoms for Peace diperkenalkan oleh Presiden AS Eisenhower pada tahun 1953. Hal ini menandai perubahan fundamental dalam pendekatan global berbasis teknologi nuklir, di mana pemanfaatan energi nuklir tidak hanya difokuskan pada kepentingan militer, tetapi juga diarahkan untuk tujuan damai seperti energi dan penelitian. Di sisi lain, program yang diinisiasi oleh Amerika Serikat tersebut juga memberikan keuntungan dalam mengamankan dan memperkuat posisi sekutunya selama periode Perang Dingin (Farooq et al., 2025). Dengan demikian, kerja sama nuklir antara Iran dan Amerika Serikat pada masa itu tidak hanya didasarkan pada kepentingan teknologi, tetapi juga merupakan bagian dari strategi geopolitik yang lebih luas.

Untuk memastikan penggunaan energi nuklir dengan tujuan damai, Iran menandatangani perjanjian NPT pada tahun 1968. Perjanjian NPT memuat larangan bagi negara selain AS, Tiongkok, Rusia, Prancis, dan Inggris untuk memiliki senjata nuklir. Perjanjian tersebut mengakibatkan Iran tidak dapat menguji segala bentuk jenis senjata nuklir (Farooq et al., 2025). Selain menandatangani perjanjian NPT, Iran juga menandatangani Safeguards Agreement dengan IAEA pada tahun 1974. Kondisi ini memungkinkan inspeksi dan verifikasi penuh terhadap fasilitas nuklir Iran (Violet B. et al., 2022). IAEA (Badan Energi Atom Internasional) adalah badan pengawas PBB untuk proliferasi nuklir yang berperan penting dalam memastikan bahwa penggunaan teknologi nuklir oleh negara-negara anggota tetap berada dalam koridor damai. Lembaga internasional ini didirikan pada tahun 1950-an sebagai respons terhadap kekhawatiran global terkait penyebaran senjata nuklir. Dengan adanya pengawasan tersebut, Iran secara formal terikat pada mekanisme internasional yang mengatur transparansi dan akuntabilitas program nuklirnya.

Pasca Revolusi Islam Iran 1979, koalisi pemerintahan yang baru menolak untuk melanjutkan program nuklir. Menurut Pemimpin Tertinggi Ayatollah Khomeini, kepemilikan senjata nuklir merupakan tindak kejahatan dan dilarang oleh etika Islam (Violet B. et al., 2022). Penolakan ini mencerminkan perubahan orientasi ideologis dalam kebijakan negara, di mana nilai-nilai agama menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan strategis. Namun, lebih dari dua dekade usai gaungan revolusi, Iran melakukan pengayaan uranium mencapai 20%. Angka tersebut melewati level kesepakatan dari Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) yang seharusnya 5%. Peningkatan uranium tersebut terjadi saat kepemimpinan Iran berada di tangan Mahmoud Ahmadinejad pada tahun 2005. Kondisi ini meningkatkan ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran (Setyawan et al., 2022). Kenaikan tingkat pengayaan uranium tersebut menimbulkan kekhawatiran internasional terkait kemungkinan pengembangan senjata nuklir, meskipun Iran tetap menyatakan bahwa programnya bertujuan damai.

Pada awal masa kepemimpinannya, Mahmoud Ahmadinejad memfokuskan kebijakannya pada pengembangan program nuklir Iran. Kebijakan ini menjadi salah satu prioritas utama dalam rangka menunjukkan kedaulatan dan kemajuan teknologi nasional. Pada bulan Agustus–September 2005, ia mengumumkan bahwa Iran telah berhasil melakukan pengayaan uranium untuk tujuan damai di fasilitas nuklir Isfahan. Pengumuman ini tidak hanya menjadi simbol keberhasilan teknologi, tetapi juga pernyataan politik terhadap dunia internasional mengenai posisi Iran. Menanggapi keberhasilan pengayaan uranium yang diumumkan oleh Ahmadinejad, Amerika Serikat mendorong Dewan Keamanan PBB untuk menghentikan program nuklir Iran melalui penerbitan resolusi (Fadila Sella & Mutiara Deniar, 2023). Resolusi 1737 menjadi sanksi pertama yang secara resmi menjatuhkan pembatasan terhadap Iran. Resolusi tersebut melarang transfer material dan teknologi yang berkaitan dengan program nuklir Iran, sehingga berdampak pada keterbatasan akses

terhadap sumber daya penting. Kebijakan ini kemudian diikuti oleh resolusi-resolusi lanjutan, yakni Resolusi 1747, 1803, dan 1929 (Purwasandi et al., 2025). Rangkaian sanksi tersebut memperlihatkan upaya komunitas internasional dalam menekan Iran agar mematuhi ketentuan non-proliferasi.

Pada 2013, Presiden Hassan Rouhani memenangkan pemilihan presiden Iran. Kemenangannya tidak terlepas dari janji untuk membawa pendekatan yang lebih rasional dan pragmatis dalam kebijakan luar negeri Iran. Berbeda dengan wacana revolusioner dan praktik konfrontatif pada masa pemerintahan Mahmoud Ahmadinejad, pemerintahan Rouhani berkomitmen melakukan desekritisasi isu-isu strategis, khususnya persoalan nuklir (Zainal Mustofa, 2023). Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi ketegangan dengan negara-negara Barat dan membuka ruang dialog yang lebih konstruktif. Pada 27 September 2013, Rouhani menghadiri sidang umum PBB di New York. Pada saat yang bersamaan, Menteri Luar Negeri Iran, Javad Zarif, bertemu dengan perwakilan kelompok P5+1, yakni Amerika Serikat, Tiongkok, Prancis, Britania Raya, Rusia, dan Jerman. Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam membuka kembali jalur diplomasi yang sebelumnya mengalami kebuntuan.

Negosiasi antara Iran dan Kelompok P5+1 pada tanggal 20 November di Jenewa telah memasuki tahapan yang lebih mendalam terhadap persoalan nuklir. Proses negosiasi ini berlangsung intensif dengan melibatkan berbagai kepentingan dan kompromi dari kedua belah pihak. Kedua pihak akhirnya menandatangani kesepakatan sementara yang dinamakan Joint Plan of Action (JPOA) (Zainal Mustofa & Syafirah, 2021). Kesepakatan ini menjadi langkah awal menuju perjanjian yang lebih komprehensif dan menunjukkan adanya kemauan politik dari kedua pihak untuk menyelesaikan konflik melalui jalur diplomasi.

Dampak JCPOA terhadap masa depan Timur Tengah dinilai signifikan. Riyadh dan Tel Aviv merespons negatif perjanjian tersebut dengan alasan bahwa JCPOA hanya menunda, bukan menghentikan, ambisi nuklir Iran. Namun, di balik argumen tersebut, terdapat kekhawatiran yang lebih mendasar bahwa JCPOA berpotensi membentuk ulang konfigurasi geopolitik kawasan Timur Tengah dengan cara yang tidak sejalan dengan strategi jangka panjang Amerika Serikat (Valadbaygi, 2025). Perubahan konfigurasi ini berpotensi memengaruhi keseimbangan kekuatan di kawasan serta hubungan antarnegara yang selama ini telah terbentuk.

Dilema keamanan berkembang menjadi persoalan serius ketika suatu negara memersepsikan adanya potensi ancaman yang dapat membahayakan keamanannya. Dalam konteks ini, program nuklir Iran dipandang sebagai ancaman oleh sejumlah negara, meskipun Iran mengklaim sebaliknya. Dalam permasalahan ini, keputusan Amerika Serikat untuk keluar dari Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) merupakan langkah kontroversial dan memicu beragam respons dari masyarakat internasional. Pemerintah Amerika Serikat dan sejumlah sekutunya berpendapat bahwa kesepakatan nuklir tersebut belum sepenuhnya mampu menghentikan perilaku Iran yang dianggap mengancam stabilitas kawasan (Angelia, 2021). Keputusan ini kemudian memperburuk hubungan diplomatik antara kedua negara serta meningkatkan ketidakpastian dalam upaya pengendalian proliferasi nuklir di kawasan Timur Tengah.

#### 4. Kesimpulan

Revolusi Islam Iran tahun 1979 menjadi titik balik sangat signifikan dalam hubungan diplomatik antara Iran dan Amerika Serikat. Sebelum revolusi, pada pemerintahan Mohammad Reza Pahlavi, kedua negara memiliki hubungan erat dan strategis, terutama dalam bidang keamanan, politik, dan kepentingan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Iran pada saat itu dipandang sebagai sekutu utama Amerika Serikat dalam menjaga stabilitas kawasan. Namun, perubahan sistem politik yang terjadi setelah revolusi membawa dampak besar terhadap arah kebijakan luarnegeri Iran. Pemerintahan baru yang berlandaskan ideologi Islam menolak pengaruh dan dominasi Barat, khususnya Amerika Serikat, sehingga hubungan yang sebelumnya harmonis berubah menjadi penuh ketegangan. Peristiwa penyanderaan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Teheran pada tahun 1979 semakin memperburuk hubungan kedua negara dan menjadi simbol awal konflik diplomatik yang berlangsung dalam jangka panjang. Sejak saat itu, hubungan Iran dan Amerika Serikat ditandai dengan sikap saling curiga dan konfrontasi yang terus berlanjut. Ketegangan tersebut kemudian berkembang melalui berbagai isu strategis, terutama terkait program nuklir Iran yang memicu kekhawatiran internasional serta kebijakan sanksi ekonomi yang diberlakukan oleh Amerika Serikat sebagai bentuk tekanan politik. Meskipun demikian, upaya normalisasi hubungan sempat dilakukan melalui perundingan internasional yang menghasilkan kesepakatan JCPOA. Kesepakatan ini menunjukkan adanya peluang untuk meredakan konflik melalui jalur diplomasi. Namun, dalam praktiknya, hubungan kedua negara tetap bersifat fluktuatif sangat dipengaruhi oleh dinamika politik domestik, regional, maupun global. Dengan demikian, transformasi hubungan diplomatik Teheran Washington pasca Revolusi Islam Iran menegaskan bahwa perubahan sistem politik domestik dapat memberikan dampak yang

signifikan terhadap pola hubungan internasional suatu negara, baik dalam bentuk kerjasama maupun konflik berkepanjangan.

## Referensi

1. Adela, S. (2017). Iran Hostage Crisis: A Sphere Full of Distrust and Failure. *Sentris*, 1(1), 31–41. <https://doi.org/10.26593/sentris.v1i1.4126.31-41>
2. Angelia, T. (2021). Konflik Amerika Serikat dan Iran Studi Kasus: Keluarnya Amerika Serikat Dari Perjanjian JCPOA. *Lino: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 1(2), 103–110. <https://doi.org/10.31605/lino.v1i2.841>
3. Baslamisli, M. (2026). Quest For Status in The Cold War: The Transformation of Shah-Era Iran–U.S. Relations Reflected in U.S. Diplomatic Documents (1969–1979). *Belgi*, 31, 413–443. <https://doi.org/10.33431/belgi.1775695>
4. Bommerla, A., Rao Bommena, A., & Reddy Manda, S. (2024). Iran-U.S Hostage Crisis. *International Journal for Multidisciplinary Research (Ijmr)*, 6(2), 1–5. <https://doi.org/10.36948/ijmr.2024.v06i02.17052>
5. Fachrudin Sumarmo, W. (2020). Sejarah Politik Republik Islam Iran Tahun 1905-1979. *Sangkep: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan*, 3(2), 145–158. <https://doi.org/10.20414/sangkep.v2i2.p-ISSN>
6. Fadila Sella, R., & Mutiara Deniar, S. (2023). Analisis Kepentingan Amerika Serikat Dalam Propaganda Media Massa Terkait Perkembangan Nuklir Iran Masa Pemerintahan Mahmoud Ahmadinejad. *Pir Journal*, 8(1), 1–14. <https://doi.org/10.22303/pir.v8i1.1>
7. Farooq, U., Saqib, M., & Mustafa, G. (2025). Iran's Nuclear Ambitions : A Potential Threat to Israel. *Pakistan Social Science Review (Pssr)*, 9(2), 89–98. [https://doi.org/10.35484/pssr.2025\(9-II\)07](https://doi.org/10.35484/pssr.2025(9-II)07)
8. Fauziah, N., Wahyuni, S., Maulana, H., Yahya, R., & Maulana, A. (2026). Revolusi Iran 1949 dan Berdirinya Republik Islam Iran: Peran Ulama Syiah dalam Transformasi Politik, Sosial, dan Budaya. *Jurnal Transformasi Pendidikan Modern*, 7(1), 163–179. <https://ejournals.com/ojs/index.php/jtpm>
9. Irawan, D. (2021). Dinamika Keamanan Kawasan Timur Tengah dalam Persaingan Kekuatan Iran dan Amerika Serikat. *Dauliyah: Journal of Islamic and International Affairs*, 6(2), 221–248. <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/2242769>
10. Kurzman, C. (2003). The Qum Protests and the Coming of the Iranian Revolution, 1975 and 1978. *Social Science History*, 3(27), 287–325. <https://doi.org/10.1215/01455532-27-3-287>
11. Maulida Alkholid, A., & Taufiq, F. (2021). Hubungan Iran-Amerika Serikat Masa Pemerintahan Hassan Rouhani (Telaah Perjanjian JCPOA). *Middle East and Islamic Studies Volume*, 8(1), 1–25. <https://doi.org/10.7454/meis.v8i1.133>
12. Mcghee, B. (2023). The Double-Edged Sword: Examining the Contradictory Nature of SAVAK and The U.S.-Iran Clidency Relationship. *History in the Making*, 16(6), 30–74. <https://scholarworks.lib.csusb.edu/history-in-the-making/vol16/iss1/6>
13. Meiza Zein, A., Alhadi, H., Erza Rafi Kurnia, M., & Tristan Shah Jahan, M. (2024). Pengaruh Revolusi Iran Terhadap Kondisi Hubungan Luar Negeri Iran pada Tahun 1978-1980. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(5), 196–202. <https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i5.456>
14. Mikail, K. (2019). Sistem Politik Iran Kontemporer: dari Westernisasi hingga Islamisasi. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, Dan Sains*, 8(2), 139–148. <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intelektualita>
15. Mikail, K., & Fathoni, A. (2019). Program Pengembangan Nuklir Iran dan Pengaruhnya terhadap Masyarakat Iran (1957-2006 M). *Jurnal Studi Sosial Dan Politik*, 3(1), 1–16. <https://doi.org/10.19109/jssp.v3i1.4064>
16. Partowazar, B. (2016). Chronological Study of Iran-U.S Relations ( 1785-1997 ). *Journal of Public Administration and Governance*, 6(4), 38–56. <https://doi.org/10.5296/jpag.v6i4.10333>
17. Pradani, Y., Arahmahwada, Dwijulianto, A., & Shoheh, M. (2026). Sejarah Revolusi Iran 1979: Awal Mula Revolusi Hingga Dampak Revolusi Islam Iran. *Inovasi Pendidikan Nusantara*, 7(1), 305–329. <https://ejournals.com/ojs/index.php/ipn>
18. Purwasandi, Desfandri Putri, R., Afifah, A., Febrillian, J., & Khonsa Syaidina, Z. (2025). Pendekatan Two-Level Games dalam Negosiasi Nuklir Iran: Dinamika Kebijakan Domestik dan Internasional dalam JCPOA. *Jurnal Hasil Penelitian Dan Pengembangan (Jhpp)*, 3(3), 111–120. <https://doi.org/10.61116/jhpp.v3i3.549>
19. Setyawan, B., Anam, S., & Sood, M. (2022). Pengaruh Kepemimpinan Hassan Rouhani Terhadap Transformasi Arah Kebijakan Program Nuklir Iran. *Ijps: Indonesian Journal of Peace and Security Studies*, 4(2), 59–77. <https://doi.org/10.29303/ijps.v4i2.114>
20. Steele, R. (2021). Crowning the “Sun of the Aryans”: Mohammad Reza Shah’s Coronation and Monarchical Spectacle in Pahlavi Iran. *International Journal of Middle East Studies*, 53(2), 175–193. <https://doi.org/10.1017/S002074382000121X>
21. Teague, W. (2024). Resistance / Rise: Iranian Student Activism in the Late 1970s US. *History of Education Quarterly*, 64(4), 510–537. <https://doi.org/10.1017/heq.2024.43>
22. Valadbaygi, K. (2025). Unpacking the 2015 Iran nuclear deal (JCPOA): Internationalisation of capital, imperial rivalry and cooperation, and regional power agency. *Political Studies Association*, 45(2), 202–222. <https://doi.org/10.1177/02633957231172060>
23. Violet B., E., Talib, J., Mbeh Attah, F., & Etim Effiong, E. (2022). Iran’s Nuclear Policy: Nature, Ambition, and Strategy. *Journal of Liberty and International Affairs*, 8(2), 202–222. <https://doi.org/10.47305/JLIA2282202e>
24. Zainal Mustofa, A. (2023). Kebijakan Luar Negeri Iran Terhadap Amerika Serikat di Bawah Kepemimpinan Hassan Rouhani. *Populika*, 11(1), 14–22. <https://doi.org/10.37631/populika.v11i1.725>
25. Zainal Mustofa, A., & Syafirah, N. (2021). Politik Ofensif Amerika Serikat terhadap Sikap Defensif Iran: dari Perang Proksi Hingga Dominasi. *Indonesian Journal of International Relations*, 5(2), 118–139. <https://doi.org/10.32787/ijir.v5i2>